



# Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach>



## Pengaruh Tingkat Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang

Nadya Vianavanka<sup>1</sup>, Asep Kurniawan<sup>2</sup>, Raden Dian Hardiana<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB,  
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia  
Correspondence: E-mail: [nvianavanka@gmail.com](mailto:nvianavanka@gmail.com)

### ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the competency level of HR, the use of SIKD and the effectiveness of SPI on the quality of the government's financial statements in Sumedang Regency. The theory used in this research is agency theory. The method used in this research is a descriptive verification method. The sampling technique used is a census or total sampling with a sample of 29 SKPD. The data analysis technique used multiple linear regression. From the results of the t-test calculation for the HR competency level variable H0 is accepted and H1 is rejected, which means that the level of HR competence does not affect the quality of the Sumedang Regency government's financial statement. For the SIKD utilization variable the H0 is accepted and H2 is rejected, which means that the use of SIKD does not affect the quality of the Sumedang Regency government's financial reports. For the SPI effectiveness variable the H0 is rejected and H3 is accepted, which means that the effectiveness of SPI has a positive effect on the quality of the Sumedang Regency government's financial reports. The F test shows that H0 is rejected and H4 is accepted, which means that the level of competence of human resources, utilization of SIKD and effectiveness of SPI have a positive effect on the quality of the financial statements of the Sumedang Regency government.

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Submitted/Received 1 July 2023

First Revised 1 August 2023

Accepted 26 August 2023

First Available online 31 August 2023

Publication Date 31 August 2023

#### Keyword:

HR Competency Level; Utilization of SIKD; Effectiveness of SPI; Quality of Government Financial Reports

## 1. INTRODUCTION

Pada saat era otonomi daerah diterapkan di Indonesia yang ditandai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dengan pembaharuan beberapa pasal pada UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Reformasi pengelolaan keuangan daerah antara lain menyangkut pendekatan di dalam penganggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pola pertanggungjawaban. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, pemerintah daerah membuat laporan keuangan yang merepresentasikan posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh entitas sector publik, kondisi keuangan dan kinerja keuangan. Sebagaimana tercantum dalam PP RI No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah “mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Setiap entitas pelaporan baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib melaksanakan SAP berbasis akrual. Laporan Keuangan (LK) yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Adapun para pemakai yang berkepentingan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu masyarakat, pimpinan/anggota DPRD, lembaga pemberi pinjaman dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati keuangan sektor pemerintah. Agar LKPD bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan, maka LKPD tersebut harus berkualitas. LKPD disebut berkualitas apabila informasi yang disajikan di dalam LKPD telah memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Kualitas dari pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan peraturan atau laporan keuangan itu memenuhi kebutuhan pengguna (Kerry, 2014). Salah satu pengukuran kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu dari opini yang diberikan oleh BPK. BPK RI menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah dikatakan sudah berkualitas apabila LKPD mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya. Ketika BPK memberikan opini WTP terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) yaitu (1) opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion; (2) opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion; (3) opini tidak wajar atau adverse opinion; dan (4) pernyataan menolak memberikan opini atau tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Dari keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos LK sesuai dengan SAP.

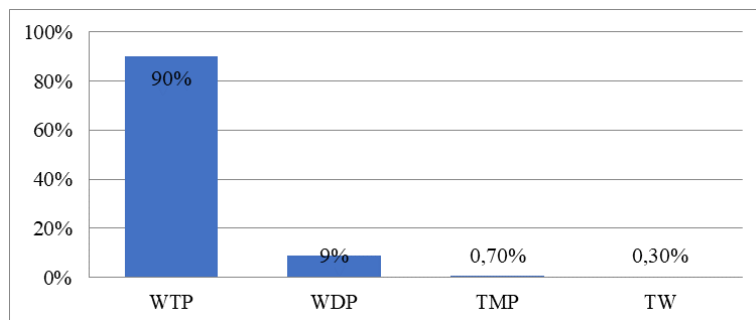
Banyaknya kasus-kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Indonesia masih menjadi isu terhangat yang perlu dikaji lebih dalam. Dasar pemikiran ini berasal dari fakta bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh BPK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Pada semester 1 tahun 2021, BPK memeriksa 541 (99%) LKPD Tahun 2020 dari 542 Pemerintah daerah yang wajib menyusun LK tahun 2020. Sebanyak 1 pemda belum

menyampaikan LK kepada BPK, yaitu pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua. Sejak tahun 2015, seluruh pemda telah Menyusun LK dengan bassis akrual sebagai pelaksanaan PP No. 71 Tahun 2019 tentang SAP.

Pemeriksaan atas LKPD tahun 2020 meliputi neraca per 31 desember 2020, LRA, LPSAL, LO, LAK, LPE dan CaLK untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2020, mengungkapkan opini WTP atas 486 (90%) LKPD, opini WDP atas 49 (9%) LKPD, opini TMP atas 4 (0,7%) LKPD, dan opini TW atas 2 (0,3%) LKPD seperti terlihat dalam gambar berikut:



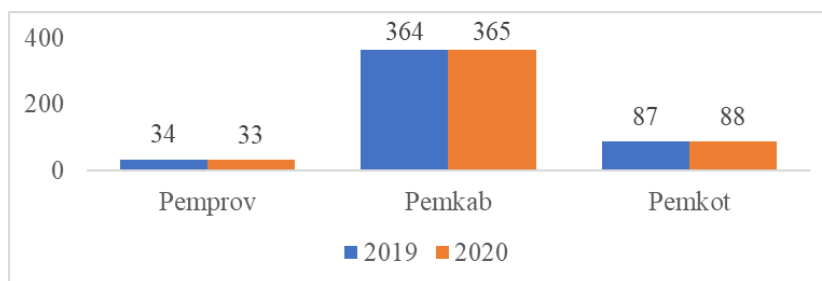
Sumber: BPK RI, 2021

**Gambar 1. Opini LKPD Tahun 2020**

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa opini LKPD tahu 2020 sangat baik karena Sebagian besar Pemda telah mendapatkan opini WTP serta mencapai target yang ditentukan dan telah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Namun, masih terdapat beberapa Pemda yang mendapatkan opini selain WTP yaitu TMP dan TW. Tentu saja ini masih menjadi kesenjangan karena seharusnya seluruh pemda mendapatkan opini WTP. Kesenjangan ini terjadi karena pos-pos LK yang disusun pemda tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Dalam 5 tahun terakhir (2016-2020), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebesar 20%. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP megalami penurunan sebesar 3,3%. Meskipun demikian, pada LKPD tahun 2020 terdapat 2 (0,3%) LKPD yang memperoleh opini TW dimana 4 tahun sebelumnya tidak pernah ada LKPD yang memperoleh opini TW.

Berdasarkan tingkat pemerintahan, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kenaikan atau penurunan opini WTP dari tahun 2019. Penurunan opini pada LKPD tahun 2020 terjadi pada Pemerintah Provinsi dari 34 menjadi 33 LKPD. Kenaikan opini terjadi pada pemerintah kabupaten dari 364 menjadi 365 LKPD, serta pada pemerintah kota dari 87 menjadi 88 LKPD.



Sumber: BPK RI

**Gambar 2. Hasil pemeriksaan LKPD Tingkat Pemerintah Berdasarkan Opini WTP Tahun 2019-2020 di Indonesia**

Berdasarkan grafik tersebut, terjadi penurunan pada tingkat provinsi. Hal ini terjadi karena permasalahan pertanggungjawaban dan pelaporan terkait dengan penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang berdampak terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan tahun 2020 terjadi pada 10 pemda.

Permasalahan ketidaksesuaian penyajian akun yang terkait dengan PC-PEN dalam LKPD tahun 2020 diantaranya : (1) penyajian kas di bendahara, pengeluaran yang berasal dari surat perintah pencairan dana, tambahan uang, belanja tak terduga tidak didukung dengan keberadaan kas baik dalam bentuk tunai maupun saldo rekening bank; (2) penatausahaan persediaan antara lain untuk penanganan COVID-19 belum didukung dengan pencatatan yang memadai (mutase masuk keluar); (3) pengakuan hutang jangka pendek lainnya terkait BTT COVID-19 tidak didukung dengan bukti pendukung yang memadai; dan (4) realisasi BTT tidak sesuai ketentuan dan tidak sesuai kondisi senyatanya.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di beberapa daerah masih rendah dikarenakan adanya permasalahan pada pertanggungjawaban, system pengendalian internal dan ketidakpatuhan.

Hal ini sejalan dengan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Berdasarkan penelitian Yohanes (2019) menyatakan bahwa Kompetensi sumber daya manusia dan system akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh, sedangkan system pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Semarang. Didukung oleh hasil penelitian Aprisyah dan Yulianti (2021) system akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Bengkulu. Namun menurut hasil penelitian Handayani, dkk (2022) menyatakan bahwa system pengendalian intern, system informasi pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kota Balikpapan.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang diteliti seluruhnya telah mendapatkan opini WTP dari BPK. Dapat disimpulkan bahwa factor pendorong kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berbeda-beda untuk setiap daerahnya meskipun telah mendapatkan opini yang sama dari BPK.

Pada tanggal 14 September 2021, Kabupaten Sumedang telah meraih opini WTP tujuh kali berturut-turut masuk dalam 52 kota yang meraih opini WTP lima kali berturut-turut dari BPK atas laporan anggarantahun 2016-2020. Dengan demikian penulis tertarik untuk memilih Kabupaten Sumedang sebagai objek penelitian.

Tujuan laporan keuangan entitas adalah menyediakan informasi tentang entitas pelaporan yang berguna untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan (IFAC, 2014).

terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, salah satu factor yang mempengaruhi yaitu kompetensi sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, terutama pada bidang akuntansi.

Faktor lain yaitu system informasi akuntansi keuangan daerah. Dalam penjelasan PP No. 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Pengawasan keuangan daerah adalah kegiatan sistematis yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam PP No. 60 Tahun 2008 ini SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu tingkat kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang, pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang, efektivitas system pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang dan tingkat kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan daerah dan efektivitas system pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang.

## 2. METHODS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif, pendekatan kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden menggunakan instrumen berupa kuesioner.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Kabupaten Sumedang yang terdiri dari 29 SKPD. Teknik pengambilan sampel yaitu sensus atau sampling total yaitu responden diambil dari kepala dan staf bagian keuangan pada seluruh SKPD dengan total 58 responden. Teknik pengambilan data menggunakan penyebaran kuesioner. Untuk memperoleh data mengenai tingkat kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan daerah, efektivitas system pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dibuat pernyataan yang disusun dengan menggunakan skala likert. Masing-masing pernyataan berisi 5 pilihan jawaban.

Data yang telah terkumpul terlebih dahulu di uji validitas dan reliabilitas menggunakan bantuan software IBM SPSS versi 25. kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Dan untuk uji hipotesis meliputi uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji F dan uji t.

## 3. RESULTS AND DISCUSSION

Dari hasil penyebaran angket yang dilakukan kepada seluruh sampel sebanyak 58 kepala dan staf bagian keuangan SKPD Kabupaten Sumedang. Setelah dilakukan penyebaran angket dan mentabulasi data maka diperoleh gambaran umum setiap variabel

**Table 1. Gambaran Umum**

Variabel	Rata-Rata	Kriteria
Tingkat kompetensi SDM	23,55%	Sedang
Pemanfaatan SIKD	89,98%	Rendah

Efektivitas SPI	42,57%	Sedang
Kualitas LKPD	8,83%	Sedang

*Sumber: data primer yang diolah, 2022*

Secara umum diketahui bahwa pertama, tingkat kompetensi sumber daya manusia berada pada kategori sedang, dengan skor rata-rata variabel tangka kompetensi sumber daya manusia sebesar 23,55%. Artinya, kepala atau staf sub bagian keuangan memiliki tingkat kompetensi dalam hal pengetahuan, keahlian dan perilaku yang baik, dapat diketahui bahwa indikator dengan rata-rata tertinggi adalah perilaku dengan nilai rata-rata 8,22% artinya kepala atau staf sub bagian keuangan memiliki sikap yang ramah, menaati peraturan dan kode etik yang berlaku. Sedangkan indikator dengan skor rata-rata terendah adalah keahlian dengan nilai rata-rata sebesar 7,53% artinya keahlian yang dimiliki oleh setiap sumber daya manusia dalam keadaan cukup baik karena sudah memiliki cukup banyak pengalaman dari pelatihan-pelatihan yang ada.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berada pada kriteria rendah dengan rata-rata skor 89,98%. Adapun indikator tertinggi pada variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terdapat pada indikator persepsi kegunaan dengan nilai rata – rata 25,05% artinya sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang digunakan pada SKPD Kabupaten Sumedang cukup mudah digunakan karena sistem tersebut membantu dalam hal kecepatan, ketepatan dan keefektifan pada saat menyusun LKPD, selanjutnya indikator dengan rata-rata terendah yaitu penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sesungguhnya dengan nilai rata-rata yang sama yaitu 8,07% artinya sistem informasi akuntansi keuangan daerah masih jarang digunakan oleh kepala atau staf bagian keuangan.

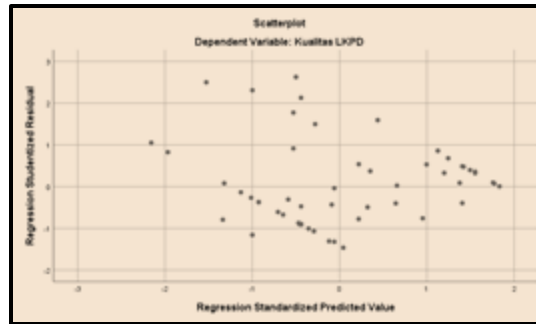
Efektivitas sistem pengendalian internal berada pada kriteria sedang dengan skor rata-rata 42,57%. Adapun indikator tertinggi pada variabel efektivitas sistem pengendalian internal terdapat pada indikator pemantauan dengan nilai rata – rata 8,69% artinya bahwa pimpinan BKAD Kabupaten Sumedang selalu menindaklanjuti setiap temuan dan mereview serta mengevaluasi temuan yang menunjukkan kelemahan dan memerlukan perbaikan, selanjutnya indikator terendah yaitu informasi dan komunikasi dengan nilai rata-rata 8,38% artinya informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan dengan cukup efektif.

Kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten sumedang berada pada kategori sedang dengan skor rata-rata 8,83%. Adapun indicator tertinggi pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang yaitu andal dengan rata-rata 8,86% artinya bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang dapat diandalkan. Indicator terendah yaitu dapat dibandingkan dengan skor rata-rata 8,76%, artinya laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang kurang dapat dibandingkan dengan laporan sebelumnya dan laporan lain.

Unuk mengetahui pengaruh tingkat kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan daerah dan efektivitas system pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang maka diperlukan pengujian yang terdiri dari beberapa tahapan. Untuk tahapan pertama adalah dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

Hasil uji normalitas data diperoleh hasil Asymp. Sig sebesar 0,087 lebih besar dari 0,05, hal ini berarti data berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas untuk tingkat kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan efektivitas system pengendalian internal masing-masing diperoleh nilai VIF 1,567; 1,339; dan 1,878 lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance 0,638; 0,747; dan 0,532 lebih besar dari

0,10. Sehingga dapat disimpulkan semua variabel independent pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dan untuk hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari gambar scatterplot berikut:



**Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Gambar 3 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Setelah dilakukan perhitungan uji asumsi klasik dan hasilnya telah memenuhi syarat, selanjutnya dilakukan perhitungan uji hipotesis yang terdiri dari regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji F dan uji t. perhitungan ini menggunakan bantuan software IBM SPSS versi 25. Hasil dari perhitungan regresi linear berganda sebagai berikut:

**Table 2. Analisis Regresi Linear Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,047	5,038		1,399	0,168
	Tingkat Kompetensi SDM	0,229	0,147	0,176	1,560	0,125
	Pemanfaatan SIKD	0,038	0,063	0,063	0,607	0,547
	Efektivitas SPI	0,455	0,095	0,595	4,816	0,000

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD

Dari hasil pengolahan data tabel diatas, dapat diketahui bahwa analisis koefisien variabel pada penelitian ini adalah pengaruh tingkat kompetensi sumber daya manusia (X1) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 0,229 atau 22,9%, pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 0,038 atau 3,8%, dan untuk pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal (X3) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 0,455 atau 45,5%.

Selanjutnya hasil perhitungan pada uji koefisien determinasi dapat dilihat pada table berikut:

**Table 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.749 <sup>a</sup>	0,561	0,536	2,357

a. Predictors: (Constant), Efektivitas SPI, Pemanfaatan SIKD,  
b. Dependent Variable: Kualitas LKPD

Hasil perhitungan regresi pada tabel diatas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*adjusted R square*) yang diperoleh sebesar 0,561. Hal ini berarti 56,1% kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang dipengaruhi oleh variabel tingkat

kompetensi sumber daya manusia (X1), pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X2) dan efektivitas sistem pengendalian internal (X3), sedangkan sisanya yaitu 43,9% kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Selanjutnya perhitungan uji F sebagai berikut:

**Table 4. Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	382,672	3	127,557	22,964	,000 <sup>b</sup>
	Residual	299,949	54	5,555		
	Total	682,621	57			

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD  
b. Predictors: (Constant), Efektivitas SPI, Pemanfaatan SIKD, Tingkat Kompetensi

berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 22,964, sedangkan nilai  $F_{tabel}$  pada taraf signifikansi 0,05 dengan  $N1 = k = 3$ ,  $N2 = n - k - 1 = 58 - 3 - 1 = 54$  menunjukkan nilai sebesar 2,776. Dengan demikian, hasil perhitungan menunjukkan bahwa  $F_{hitung}$  (22,964)  $> F_{tabel}$  (2,776), maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang artinya, tingkat kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh positif secara bersama – sama terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa regresi berarti dan dapat digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian, dan untuk perhitungan uji t sebagai berikut:

**Table 5. Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	7,047	5,038		1,399	0,168
	Tingkat Kompetensi SDM	0,229	0,147	0,176	1,560	0,125
	Pemanfaatan SIKD	0,038	0,063	0,063	0,607	0,547
	Efektivitas SPI	0,455	0,095	0,595	4,816	0,000

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD

Pengujian hipotesis melalui uji t, tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% derajat kebebasan dengan rumus,  $df = n - k$  ( $58 - 3 = 55$ ) menunjukkan nilai sebesar 2,004. Adapun hasil uji t pada tabel hasil uji t dengan menggunakan SPSS 25 adalah sebagai berikut:

Variabel tingkat kompetensi sumber daya manusia (X1) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 1,560 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,004. Hal tersebut menunjukkan bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1,560 < 2,004$ ) atau dengan kata lain  $H_0$  diterima sedangkan  $H_1$  ditolak, yang berarti tingkat kompetensi sumber daya manusia (X1) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kompetensi sumber daya manusia termasuk menjadi salah satu faktor pendorong kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari hasil pengolahan kuesioner diperoleh Tingkat kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dikarenakan sebagian besar latar belakang pendidikan kepala atau staf bagian keuangan berlatar belakang pendidikan diluar akuntansi, ekonomi dan manajemen sehingga pemahaman terkait penatausahaan laporan keuangan belum memadai, pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan yang baru masih belum mapan dan peran pembinaan melalui audit internal



yang kurang (belum independen). Keahlian yang dimiliki oleh kepala atau staf bagian keuangan masih rendah dikarenakan masih ada beberapa kepala atau staf bagian keuangan yang belum lama bekerja atau kurang dari 10 tahun sehingga pengalaman yang dimilikinya dan pelatihan-pelatihan yang diikutinya masih sedikit hal ini dapat dilihat dari data identitas yang diisi oleh responden pada bagian pelatihan teknis yang telah diikuti, sedangkan pengalaman dan pelatihan merupakan salah satu faktor pendorong untuk meningkatkan keahlian kepala atau staf bagian keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Aprisyah dan Yuliati (2021) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X2) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 0,607 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,004. Hal tersebut menunjukan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $0,607 < 2,004$ ) atau dengan kata lain  $H_0$  diterima sedangkan  $H_1$  ditolak, yang berarti pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X2) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah (SIKD) adalah suatu fasilitas yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan untuk mengumpulkan, melakukan validasi, mengolah, menganalisis data dan menyediakan informasi keuangan daerah dalam rangka merumuskan kebijakan dalam pembagian dana perimbangan, evaluasi kinerja keuangan daerah, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta memenuhi kebutuhan lain, seperti statistik keuangan negara.

Fenomena yang ada menunjukkan bahwa tanggapan kepala atau staf bagian keuangan mengenai indikator penggunaan SIKD sesungguhnya yang masih dalam kategori rendah menjelaskan kesulitan mereka dalam pengoperasian sistem dan pengelolaan laporan keuangan masih belum memadai. Temuan ini diperkuat berdasarkan hasil survey di lokasi yang memberikan gambaran banyaknya pengelola keuangan berusia antara 41-50 tahun dan jarang mengikuti pelatihan terkait sistem pengelolaan keuangan pemerintah, sehingga untuk memahami kinerja sebuah sistem akan sedikit lebih sulit jika tidak mengikuti pelatihan secara rutin.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Diani (2014) bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Efektivitas sistem pengendalian internal (X3) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 4,816 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,004. Hal tersebut menunjukan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,816 < 2,004$ ) atau dengan kata lain  $H_0$  ditolak sedangkan  $H_1$  diterima, yang berarti efektivitas sistem pengendalian internal (X3) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Efektivitas pengendalian internal dipandang sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal yang efektif akan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Tujuan Sistem Pengendalian Internal ada tiga, yaitu, (1) Tujuan Operasi; (2) Tujuan Pelaporan; dan (3) Tujuan Kepatuhan.

Fenomena yang ada menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal pada SKPD Kabupaten sumedang berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan pimpinan BKAD selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh serta selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan maupun saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahman Pura (2021) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### 4. CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis deskriptif, pada umumnya tingkat kompetensi sumber daya manusia berada pada kategori sedang, pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan daerah berada pada kategori rendah, efektivitas system pengendalian internal berada pada kategori sedang dan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang berada pada kategori sedang.

Sedangkan berdasarkan perhitungan uji t dapat disimpulkan bahwa tingkat kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang, sedangkan efektivitas system pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang.

#### 5. AUTHORS' NOTE

*The authors declare that there is no conflict of interest regarding the publication of this article. Authors confirmed that the paper was free of plagiarism.*

#### 6. REFERENCES

- A. S. Nurillah, And D. M. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu). *Journal Of Accounting*, 3.
- Adha Inapty, M. A. F. B., & Martiningsih, R. S. P. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Skpd Di Pemprov Ntb). *Akuntabilitas*, 9(1), 27–42. <https://doi.org/10.15408/Akt.V9i1.3583>
- Aprisyah, P., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu). *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(2), 1855–1869.
- Arif, B., Muchlis, & Iskandar. (2002). *Akuntansi Pemerintahan (Pertama)*. Penerbit Salemba Empat.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2012). *Reliabilitas Dan Validitas*. Pustaka Pelajar.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar (Ketiga)*. Pt Penerbit Erlangga.
- Bodnar, G. H. And W. S. H. (2006). *Sistem Informasi Akuntansi*. Penerbit Andi.
- Breda, H. Dan Van. (2000). *Accounting Theory (Internatio)*. Mc Graw Hill.
- Budiati, L. (2012). *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt. Raja Grafindo Persada.
- Coso. (2013). *Internal Control - Integrated Framework Executive Summary*. Coso, May, 1–20.

- Erawati, T., & Abdulhadi, M. F. (2018). The Effect Of Understanding Regional Financial Accounting Systems, Human Resources Capacity And The Utilization Of Information Technology On The Quality Of Information On Regional Government Financial Statements. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Akmenika*, 15(1), 67–78.
- Handayani, F., Mustika Sari, D., & Yuniarti, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhikualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintahdaerah Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 11.
- Harlinda, H. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau). *Sorot*, 11(2), 127. <https://doi.org/10.31258/Sorot.11.2.3890>
- Herath, S. K., & Albarqi, N. (2017). Financial Reporting Quality : A Literature Review School Of Business Administration. *International Journal Of Business Management And Commerce*, 2(2), 1–14.
- Jensen, M. Dan W. M. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*.
- Jogiyanto. (2007). Sistem Informasi Keperilakuan. Andi Offset.
- Laila, Y. N., & Agustini, R. D. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemanfaatan. *Jurnal Bisnis & Ekonomi*, Volume 14,(1), 56–64.
- Lusiyana, D., Susbiyani, A., & Eko, D. (2020). Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Journal Of Business, Management And Accounting*, 2. <https://doi.org/10.31539/Budgeting.V2i1.1225>
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo (Ed.)). Cv. Andi Offset.
- Moehariono. (2012). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Raja Grafindo Persada.
- Niswonger, Rollin C., Warren, Carl S., Reeve, James M., & Fess, P. E. (1999). Prinsip-Prinsip akuntansi (A. S. Dan H. Gunawan (Ed.); Edisi Kese). Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern
- Prayitno, W. Dan S. (2002). Standarisasi Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Menuju Era Globalisasi Global. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Bkn.
- Pura, R. (2021). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 17(April), 183–193. <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/Akmen>
- Pura, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 18(1), 1–13. <https://doi.org/10.37476/Akmen.V18i1.1316>
- Qomah, S. (2021). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 95–108. <https://doi.org/10.25105/Jat.V8i1.8718>
- Rosmalita, N., & Nadirsyah, N. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 239–248. <https://doi.org/10.24815/Jimeka.V5i2.15559>
- Sekaran, Uma Dan Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach* (7th Ed.). New Jersey.

- Suhardjo, Y. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Semarang). *Majalah Ilmiah Solusi*.
- Sugiyono. (2019a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019b). *Statistika Untuk Penelitian*. Cv Alfabeta.
- Susanto, A. (2004). *Sistem Infomasi Akuntansi*. Lingga Jaya.
- Sutrisno, H. (2004). *Metodologi Research 2*. Andi Offset.
- Suwanda, D. (2015). Factors Affecting Quality Of Local Government Financial Statements To Get Unqualified Opinion (Wtp) Of Audit Board Of The Republic Of Indonesia (Bpk). *Research Journal Of Finance And Accounting*, 6(4), 139–157.
- Tuasikal, A. (2007). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik*, 08.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 24 ayat (1) Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Yensi, D. S., Hasan, A., & Anisma, Y. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Kuantan Singingi). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 1(1), 1–16.  
<https://Ejournal.Uncen.Ac.Id/Index.Php/Keuda/Article/View/714/649>